

Judul : DPR Rapat Marathon Bahas Haji, Biaya Haji Diketok 39.8 Juta, Garuda Tidak Ambil Untung
Tanggal : Senin, 18 April 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

DPR Rapat Maraton Bahas Haji

Biaya Haji Diketok 39,8 Juta Garuda Tidak Ambil Untung

Anggota Komisi VIII DPR Abdul Wachid mengatakan, parlemen dan Pemerintah menyepakati ongkos perjalanan ibadah haji tahun 2022 sebesar Rp 39,8 juta. Sebelumnya, pada 2020 biaya haji sebesar Rp 35,2 juta. Dengan demikian, ada selisih kenaikan senilai Rp 4 juta.

"BIPIH (Biaya Perjalanan Ibadah Haji) Tahun 2022 sebesar Rp 39.886.009 merupakan angka yang sangat rasional dan jalan tengah bagi semua pihak," kata Abdul Wachid, kemarin.

Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat bersama Kementerian Agama (Kemenag) pada Rabu (13/4). Dalam rapat tersebut, pembiayaan haji menjadi bahasan cukup alot. Termasuk bahasan penentuan besaran kuota hingga ketentuan umur calon jemaah haji.

"Selama dua hari dua malam, Komisi VIII dan Kemenag secara maraton membahasnya dengan terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Yakni, mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan Pemerintah Arab Saudi," jelasnya.

Politisi Gerindra ini mengungkapkan, biaya haji jadi pembahasan alot. Terutama ketika membahas ongkos biaya pesawat bersama maskapai Garuda Airlines. Apresiasi patut diberikan ke maskapai Garuda yang legowo tidak ambil untung dalam penetapan biaya haji tahun ini.

"Avtur itu tidak bisa dinegosiasi, dengan Garuda agak alot karena masalah ini. Sudah kita tekan sampai muncul angka di 39 (juta) sekian, sebenarnya di atas itu. Ini angka terbaik, sudah mepet sekali. Garuda tidak ambil untung, ini bentuk kepedulian mereka," kata Wachid.

Wachid menuturkan, penentuan besaran kuota jadi masalah selanjutnya. Diputuskan, asumsi kuota haji Indonesia tahun ini sebanyak 110.500 jemaah atau 50 persen dari kuota haji tahun 2019.

Adapun rincian kuota untuk jemaah haji reguler sebanyak 101.660 dan haji khusus sebanyak 8.840 orang.

Selain itu, persoalan umur calon jemaah haji yang berusia di atas 65 tahun ke atas ditunda pemberangkatannya.

Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah itu bilang, ini akan menjadi permasalahan tersendiri. Apalagi, secara nasional jumlahnya sangat besar.

"Memang belum ada keputusan pasti mengenai kuota jemaah haji, estimasi di angka 50 persen itu asumsi kita (DPR-

Kemenag). Mudah-mudahan ini tidak berubah, karena keputusan Pemerintah Arab Saudi masih berubah-ubah. Saya masih optimis masih tetap 50 persen," jelas Wachid.

Sementara, Wakil Ketua Komisi VIII DPR Aceh Hasan Syadzily menyatakan, biaya haji sebesar Rp 39,8 juta tidak akan dibebankan ke jemaah. Tambahan biaya jemaah haji lunas tunda dibebankan ke alokasi *virtual account* para calon jemaah haji tahun 2020 yang selama ini dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).

"Kami berkomitmen memaksimalkan pelayanan kepada jemaah haji tahun 1443H/2022M. Kami tetap mendorong agar pelaksanaan haji di era pandemi ini tetap memperhatikan protokol kesehatan," tutur politisi muda Golkar ini.

Untuk informasi, biaya yang dibayar langsung oleh jemaah haji rata-rata per jemaah sebesar Rp 39.886.009, meliputi biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi di Mekkah dan Madinah, biaya hidup dan biaya visa.

"Dengan kenaikan biaya haji ini, tidak akan dibebankan satu rupiah pun kepada jemaah haji. Artinya, ada kenaikan Rp 35 juta dari 2020, sudah sepakat tidak dibebankan pada calon jemaah haji, akan disesuaikan dengan embarkasi," pungkasnya. ■ KAL